Pers Release
WALHI Kalimantan Tengah
Palangka Raya, 09 November 2026

Pelaporan 8 Konsesi Terindikasi Terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Tengah

"Masih Bernyalikah Institusi Penegak Hukum di Kalimantan Tengah Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Korporasi?"

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali berulang di Kalimantan Tengah pada tahun 2026. Padahal, peringatan dini telah disampaikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak awal tahun 2026. Peristiwa ini bukanlah kejadian yang pertama kali terjadi, mengingat Kalimantan Tengah sebelumnya juga mengalami karhutla pada tahun 2015, 2019, dan 2023. Berulangnya peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla merupakan persoalan serius yang membutuhkan langkah antisipatif, sistematis, dan penanganan yang menyeluruh dari pemerintah.

Merespons ancaman tersebut, WALHI Kalimantan Tengah sejak April 2026 telah berulang kali menyampaikan peringatan melalui sejumlah rilis pers dan konferensi pers. WALHI Kalimantan Tengah mengingatkan pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum, agar mempersiapkan langkah konkret dalam menghadapi ancaman fenomena *Godzilla El Niño* tahun 2026. Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, tetapi juga kesiapan dalam melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla.

Belajar dari pengalaman penegakan hukum pada tahun-tahun sebelumnya, penanganan kasus karhutla tidak boleh kembali hanya menyasar aktor perorangan, khususnya peladang dari masyarakat adat. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada masyarakat yang berada di tingkat tapak, sementara aktor-aktor besar yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa kebakaran justru luput dari pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks ini, penegakan hukum sudah semestinya tidak memandang latar belakang maupun posisi seseorang atau korporasi. Prinsip keadilan dan transparansi harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam mengungkap dan menindak aktor-aktor besar di balik peristiwa karhutla yang terus berulang. Terlebih, dampak yang ditimbulkan telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Kalimantan Tengah, baik dari aspek kesehatan, lingkungan hidup, maupun kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) **Kalimantan Tengah** - **Friends of the Earth** (FoE) **Indonesia Central Kalimantan** | Jln. Yogyakarta Blok A4, RT 001 RW 013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah - 73111 | IG : @walhikalteng | X : @walhi_kalteng | Tik-tok : @walhikalteng | FB : WALHI KALIMANTAN TENGAH | Website : www.walhikalteng.org | Email : Kalteng@walhi.or.id | No. HP/WhatsApp : +62 813-4600-9070

Besarnya dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dapat dilihat dari data yang dihimpun oleh sejumlah instansi pemerintah. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat setidaknya terdapat 114.365 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober 2026. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 2 November 2026, tercatat total kumulatif sebanyak 401.586 kasus ISPA akibat karhutla di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Angka tersebut menjadi gambaran serius mengenai dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat sekaligus preseden buruk bagi Kalimantan Tengah pada tahun 2026, sebagai salah satu provinsi dengan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas.

Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, skala kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil analisis WALHI Kalimantan Tengah, data makro karhutla sepanjang Januari hingga September 2026 menunjukkan bahwa luas area terbakar setidaknya mencapai 81.587 hektare. Selain itu, sebanyak 205.926 titik panas (*hotspot*) terdeteksi sejak Januari hingga Oktober 2026. Data tersebut memperlihatkan besarnya skala ancaman karhutla yang terjadi dan semakin memperkuat urgensi dilakukannya penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk terhadap korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi terbakar.

Sebagai bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang tidak tebang pilih, WALHI Kalimantan Tengah melakukan analisis dan identifikasi terhadap sejumlah aktor besar, khususnya korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran. Berdasarkan hasil analisis tersebut, WALHI Kalimantan Tengah mengidentifikasi 8 konsesi perusahaan yang terindikasi kuat memiliki area terbakar. Dari 8 konsesi tersebut, WALHI Kalimantan Tengah kemudian melanjutkan proses verifikasi melalui pemantauan lapangan terhadap 3 konsesi sebagai sampel. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa ketiga konsesi tersebut memang memiliki area yang terbakar. Temuan ini semakin memperkuat indikasi adanya kebakaran di dalam wilayah konsesi perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan tersebut, WALHI Kalimantan Tengah secara resmi melaporkan 8 perusahaan kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Tengah karena wilayah konsesinya terindikasi kuat mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kesembilan perusahaan tersebut terdiri atas 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 2 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dengan rincian sebagai berikut:

1. Perusahaan Perkebunan Sawit : PT Globalindo Agung Lestari (Genting Plantations Group), PT United Agro Indonesia (Genting Plantations Group), PT Arjuna Utama Sawit (First Borneo Group), PT Tapian Nadenggan (Sinar Mas Group/GAR), PT Maju Aneka Sawit (Musimas Group), PT Globalindo Alam Perkasa (Musimas Group)

2. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) : PT Industrial Forest Plantation (Nusantara Fiber Group), PT Baratama Putra Perkasa

Janang Firman Palanungkai selaku **Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah** menyampaikan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh WALHI saat ini bukan pelaporan pertama kali disaat peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Terbaru pada tahun 2023, WALHI Kalimantan Tengah bersama Save Our Borneo dan LBH Palangkaraya pernah melaporkan 4 perusahaan terindikasi konsesinya terbakar ke POLDA Kalimantan Tengah. Namun hingga sekarang proses laporan tersebut belum ada tindak lanjut yang jelas. Bahkan 4 perusahaan tersebut masih beroperasi hingga saat ini.

"Hal ini penting menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Kalimantan Tengah, khususnya POLDA Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil kajian, WALHI Kalimantan Tengah menemukan setidaknya 8 perusahaan besar swasta yang terindikasi mengalami kebakaran di area konsesinya. Temuan ini harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya, sementara penegakan hukum justru lemah terhadap korporasi dan tajam terhadap masyarakat kecil. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan ekologis di Bumi yang dikenal sebagai Paru-Paru Dunia ini," Katanya.

Janang juga menegaskan bahwa ketegasan institusi penegak hukum di Kalimantan Tengah sangat diharapkan oleh WALHI Kalimantan Tengah. Karena ini akan memberikan preseden baik bagi konsistensi penegakan hukum di Bumi Tambun Bungai. Penegakan hukum ini juga semestikan ditindaklanjuti secara transparan kedepan, sehingga tidak menimbulkan berbagai asumsi.

"Kami berharap institusi penegak hukum di Kalimantan Tengah, khususnya POLDA Kalimantan Tengah, senantiasa menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil, profesional, dan transparan. Terlebih, terkait penanganan sejumlah korporasi. Sebelumnya, Bareskrim POLRI maupun POLDA Kalteng pernah mengumumkan bahwa mereka menangani kasus karhutla yang dilakukan oleh korporasi, tetapi hingga kini informasi kepada publik masih sebatas penyebutan inisial. Bahkan setahu kami baru 2 yang ditetapkan Tersangka. Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani? Hal inilah turut mendorong kami melaporkan sejumlah perusahaan agar menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Kami berharap setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel. Jangan sampai hukum kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan korporasi besar, tetapi justru tajam terhadap masyarakat kecil. Sebab, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Janang.

Selaras dengan Janang, **Agung Sesa** selaku **Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalimantan Tengah** menyampaikan bahwa "*Proses pelaporan yang dilakukan WALHI Kalimantan Tengah hari ini merupakan bagian dari konsistensi kami dalam menjalankan kerja-kerja advokasi untuk memperjuangkan penyelamatan lingkungan hidup yang adil dan lestari di Bumi Tambun Bungai. Pelaporan ini sekaligus menjadi ujian bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu. Terlebih, sejumlah perusahaan yang kami laporkan merupakan aktor korporasi besar yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di dalam wilayah konsesinya. Jangan sampai proses penegakan hukum justru berlangsung tanpa transparansi, tebang pilih, bahkan membuka ruang bagi lahirnya impunitas hukum bagi aktor-aktor korporasi besar. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah*," Tegas Agung Sesa.

Kontak Person :

1. **Janang Firman P**. (janangfirmanpalanungkai@walhi.or.id)
2. **Agung Sesa** (oragungsesa@walhi.or.id)